

PENGARUH PROGRAM *BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES* (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI JAWA TIMUR

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai cita ideal berbangsa dan bernegara untuk “mensejahterakan rakyat” sebagai sebuah kontrak yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah dimanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan yang berbeda dalam beberapa fase (orde), yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

Orde Baru dengan trilogi pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, berkembang dengan kebijakan *developmentalisme* yang mengarah pada konglomerasi. Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada usaha skala besar sehingga ketika krisis ekonomi melanda Asia banyak usaha tersebut yang kolaps, bahkan telah memporak-porandakan ekonomi makro Indonesia. Berbagai paket kebijakan telah diambil pemerintah,

namun demikian sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhirnya krisis, berbeda dengan negara-negara tetangga yang mengalami krisis yang sama, telah berhasil mengatasi, seperti Malaysia, Korea, Thailand dan lainnya.

Disinyalir bahwa keterpurukan ekonomi yang tak kunjung selesai ini disebabkan rapuhnya pondasi ekonomi Indonesia. Sistem konglomerasi dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dengan konsep *developmentalisme* telah mengesampingkan potensi-potensi ekonomi kecil dan menengah. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) bukanlah menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi pada sistem ekonomi *developmentalisme*. Ketika krisis melanda negeri ini, kesadaran muncul bahwa bisnis yang dibangun dengan sistem konglomerasi banyak yang ambruk. Konsep **Ekonomi Kerakyatan** menjadi solusi alternatif sebagai konsep ekonomi yang berbasis pada usaha kecil menengah dan bukan pada sistem konglomerasi. Sistem perbankan syariah juga kemudian menjadi menjadi salah satu alternatif pilihan model perbankan, karena perbankan konvensional banyak yang kolaps dan dilikuidasi ketika badai krisis menerpa.

Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) dalam masa krisis, telah menunjukkan ketahanannya menghadapi gejolak makro. Skala usaha tersebut mampu bertahan dan bahkan tumbuh dengan sangat signifikan. Jawa Timur pada tahun 1999-2002 (berdasarkan

data statistik) menunjukkan bahwa pada tahun tersebut peranan UKM dalam perekonomian moneter (PDRB ADHB) besarnya sekitar 52 persen, walaupun secara riil (PDRB ADHK) besarnya sekitar 50 persen. Kemudian jika diperhatikan setiap tahunnya nilai tambah UKM terhadap PDRB Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 1999 yang hanya 1,4%. Peningkatan tersebut adalah : sebesar 5,2% pada tahun 2002, 5,32% tahun pada 2001, 3,59% pada tahun 2000. (Analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur, tahun 1998-2002, Buku 2. Ringkasan Eksekutif, Pemerintah Propinsi Jawa Timur).

Peran besar UKM tersebut menjadi sebuah ironi, dengan karakteristik UKM secara umum yang digambarkan oleh Anoraga dan Sudantoko (2002:225-6) yang lebih banyak merupakan kelemahan, yaitu:

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit menilai kinerjanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dan mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta difersifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Kekuatan besar UKM dalam menopang ekonomi moneter baik regional Jawa Timur maupun nasional bertumpu pada beberapa keunggulan UKM dibanding usaha besar, yaitu :

1. UKM biasanya memenuhi permintaan (*aggregate demand*) yang terjadi di wilayah regionalnya sehingga UKM menyebar di seluruh pelosok dengan ragam bidang usaha.
2. Mempunyai keleluasaan atau kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar mengingat modal sebagian besar terserap pada modal kerja dan sangat kecil yang dimasukkan dalam aktiva tetap sehingga yang dipertaruhkan juga kecil. Dampak dari hal ini adalah kemudahan untuk meng *up to date* produknya sehingga mempunyai derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.

3. Sebagian besar UKM adalah padat karya (*labour intensive*) mengingat teknologi yang digunakan UKM relatif sederhana. Persentase distribusi nilai tambah sangat besar sehingga distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Hubungan erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi.

(Anoraga dan Sudantoko, 2002 : 227)

Menyadari kelemahan-kelemahan KUKM tersebut di atas baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya produksi lainnya, Departemen Koperasi Dan UKM, melakukan pembinaan terhadap UKMK diantaranya dengan Program *Business Development Services (BDS)*. Program ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja UKM.

Program *Business Development Services (BDS)* dapat ditinjau dari dua aspek. *Pertama*, jika ditinjau dari aspek operasional, *Business Development Services (BDS)* merupakan jasa layanan pengembangan usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan, akses pasar dan kemampuan bersaing, yang bersifat non finansial, bersifat dinamis dengan cakupan yang luas serta fokus pada kebutuhan UKMK. *Kedua*, jika ditinjau dari aspek kelembagaannya *Business Development Services (BDS)* adalah suatu Lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan

bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja UKM. Lembaga tersebut berbadan hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanan. (Program *Business Development Services* (BDS)/Lembaga Pelayanan Bisnis (LPB) Propinsi Jawa Timur; Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Propinsi Jawa Timur, 2002).

Layanan Pengembangan Bisnis adalah layanan yang diberikan BDS kepada UKM yang meliputi kegiatan antara lain :

1. Layanan informasi
2. Layanan konsultasi
3. Layanan pelatihan
4. Melakukan bimbingan/pendampingan
5. Menyelenggarakan kontak bisnis
6. Fasilitasi dalam memperluas pasar
7. Fasilitasi dalam memperoleh permodalan
8. Fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen.
9. Fasilitasi pengembangan teknologi
10. Penyusunan proposal pengembangan usaha

Untuk melayani UKMK, Kantor Menegkop dan UKM menyediakan fasilitas kepada BDS berupa : 1). pinjaman lunak tanpa bunga dalam bentuk modal kerja sebesar Rp. 50.000.000,-

(Lima puluh juta rupiah) yang dikembalikan dalam jangka 3 (tiga) tahun untuk digunakan melayani UKMK lainnya. 2). Subsidi honorarium sebesar Rp. 1.495.000,- per bulan untuk tiga personil BDS (tidak perlu dikembalikan).

Dalam semangat otonomi daerah serta upaya penyelenggaraan *good governance*, perlu adanya pengawasan oleh publik, termasuk kalangan akademisi, terhadap setiap kebijakan pemerintah. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah terkait dengan program BDS.

Sejauh ini sistem evaluasi dan monitoring yang dilakukan adalah hanya berdasar pada laporan dari BDS yang disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi UKM/Pokja yang dibentuk meliputi :

- a. Realisasi pemanfaatan dukungan dana operasional BDS
- b. Laporan bulanan perkembangan layanan BDS
- c. Laporan perkembangan UKM dalam sentra binaan

Kemudian laporan tersebut dari Dinas kabupaten/Kota dilaporkan ke Dinas Propinsi yang dilanjutkan lagi pelaporannya pada tim identifikasi, seleksi dan penetapan BDS pusat yang kemudian dilaporkan ke Meneg Koperasi dan UKM. (Petunjuk teknis *Business Development Services*, Kementrian KUKM RI; 2002:21).

Fakta yang menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dirujuk dari dua sumber data, yaitu : *pertama*, hasil riset *Human Development Index* (HDI) dari *United Nation For Development Pogram* (UNDP) menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada pada 109 pada tahun 2000. *kedua*, kualifikasi SDM Indonesia menurut hasil survei Angkatan Kerja Nasional Indonesia pada tahun 1996, dengan jumlah Angkatan Kerja sebesar 88,2 juta orang, mempunyai komposisi pendidikan sebagai berikut : 1) Akademi & Perguruan Tinggi sebesar 3,20%, 2) Diploma I & II sebesar 0,62%, 3) SLTA sebesar 17,40%, 4) SLTP sebesar 12,96 %, dan 5) SD ke bawah sebesar 3,20%.

Upaya peningkatan kinerja UKM dengan Program BDS akan dapat tercapai apabila para pengelola UKM tersebut mempunyai gairah dan semangat kerja yang tinggi. Oleh karena itu selain program pembinaan *skill* baik managerial maupun skill operasional, juga perlu adanya rangsangan atau stimulan untuk menuju yang lebih baik. Upaya untuk meingkatkan semangat kerja pengelola UKM salah satunya adalah dengan memberikan motivasi. Sehingga dengan motivasi tersebut ada upaya untuk memperbaiki diri serta optimalisasi potensi yang ada pada diri pengelola UKM itu sendiri. Motivasi menjadi bagi karyawan (tenaga kerja) baik secara individu maupun *team work*, karena akan terkait dengan kinerja tertentu yang

dapat mencerminkan ukuran nilai yang dihasilkan para tenaga kerja tersebut.

Keith Davis dalam Mangkunegara (2000:67) mengatakan bahwa yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*).

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dalam upaya berpartisipasi pada pengembangan SDM industri dan bisnis khususnya para pengelola UKM di Jawa Timur, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Program *Business Development Services (BDS)* Terhadap Kinerja Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Jawa Timur**”.

1.2. Rumusan Masalah

Terjadinya kesenjangan antara cita ideal UKM khususnya di Jawa Timur dengan realitas yang ada menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan serius pada UKM itu sendiri. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh UKM yang meliputi antara lain : a) Sistem pembukuan yang tidak memenuhi standar, b) Keterbatasan modal usaha, c). Margin usaha yang cenderung tipis, d) Kemampuan manajerial sangat terbatas, e) Skala ekonomi yang terlalu kecil, f) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta difersifikasi pasar

sangat terbatas, serta g) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah.

Kelemahan-kelemahan tersebut ibarat sebuah lingkaran yang saling mempengaruhi. Secara umum kelemahan tersebut lebih pada permasalahan Sumber Daya Manusia UKM.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi dan UKM sebagai institusi yang secara formal diberi tanggung jawab untuk mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah menerapkan kebijakan Program *Business Development Services* (BDS) yang memberikan jasa layanan pengembangan usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan, akses pasar dan kemampuan bersaing, yang bersifat non finansial, bersifat dinamis dengan cakupan yang luas serta fokus pada kebutuhan UKMK. Secara umum kegiatan-kegiatan layanan yang diberikan oleh BDS kepada UKM tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi menjadi tiga, yaitu : 1) Fungsi perencanaan, meliputi : layanan informasi, layanan konsultasi, bimbingan/pendampingan, dan penyusunan proposal pengembangan bisnis, 2) Fungsi pelaksanaan, meliputi : layanan pelatihan, fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen, serta fasilitasi dalam memperoleh permodalan, dan 3) Fungsi pengembangan, meliputi : penyelenggaraan kontak bisnis, fasilitasi dalam memperluas pasar, dan fasilitasi dalam pengembangan teknologi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dalam penelitian dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Program *Business Development Services* (BDS) yang terdiri dari faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, faktor pengembangan dan faktor motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelola UKM di Jawa Timur ?.
2. Mana diantara keempat faktor tersebut yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pengelola UKM di Jawa Timur ?.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Program *Business Development Services* (BDS) terhadap Kinerja Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor Program *Business Development Services* (BDS) yang dominan pengaruh terhadap Kinerja Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Tinjauan Akademis

Ditinjau dari aspek akademis, manfaat penelitian ini adalah :

1. Adanya analisis dan pembuktian pengaruh Program *Business Development Services (BDS)* terhadap Kinerja Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur.
2. Ditemukannya faktor-faktor Program *Business Development Services (BDS)* yang mempunyai pengaruh dominant terhadap Kinerja Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur.

B. Tinjauan Praktis

Ditinjau dari aspek praktis penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat antara lain :

1. Memperkaya literatur dan *hazanah* keilmuan terutama terkait dengan permasalahan Program *Business Development Services (BDS)* dan Kinerja Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur serta sebagai bahan rujukan bagi peneliti sesudah penelitian ini yang mengambil tema dan permasalahan serupa.
2. Sebagai evaluasi atas pelaksanaan Program *Business Development Services (BDS)* yang digagas oleh Departemen Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta memberikan masukan-masukan guna penyempurnaan program tersebut.